

Pemerintah, Kantor Wali, Kantor Sekretaris Daerah, aula utama dan Kantor Bendahara Umum. Karya desain ini menggunakan analisa dan sintesa yang mengumpulkan keseluruhan data-data lalu mengolahnya menjadi alternatif desain yang memberikan hasil solusi optimal.

Kata Kunci: Pemerintahan, Kota, Citra, Transparan, Interior

I. PENDAHULUAN

Kantor Pemerintahan Kota merupakan wadah aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tempat para wakil rakyat mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan di segala sektor kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pemerintahan Kota membutuhkan tuntutan khusus yakni,

wadah yang b
keterbukaan s
laju pertumb
jumlah pend
masyarakat t
trasparan, pa
mengantisipasi
Yogyakarta te



teknis, serta fungsi
ah. Seiring dengan
semakin pesat dan
kat pula tuntutan
al, efisien, efektif,
kat. Dalam rangka
inan, maka Kota
ah dan perusda.

Pemb
mencerminka
masyarakat y

kat ini masih belum
adanya kelompok
sebut kaum difabel

belum menikmati hasil dari pembangunan kota terutama di bidang aksesibilitas pada ruang publik kota. Dalam skala Nasional, perumusan kebijakan dan undang-undang tentang aksesibilitas kaum difabel telah dikumandangkan dalam Undang-undang RI no. 4 tahun 1997 tentang upaya peningkatan sosial penyandang cacat dan Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Berdasarkan isu aksesibilitas untuk kaum difabel diatas, penulis tertarik untuk merancang Kantor Balai Kota Yogyakarta berkaitan dengan tuntutan penerapan desain yang universal dimana sesuatu hal yang membatasi seseorang untuk melakukan suatu aktifitas gerak maupun penghambat keleluasaan ruang

